

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai sistem informasi akuntansi dalam proses pembayaran klaim dana pensiun pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh DPLK BNI, yaitu sistem DPLK SURE, proses pengelolaan data, pencatatan transaksi, dan pembayaran klaim dana pensiun dapat berjalan secara efisien, akurat, dan akuntabel. Sistem ini memberikan kemudahan dalam memproses klaim serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga.
- b. Proses pelaksanaan pembayaran klaim dana pensiun di DPLK BNI dilakukan dengan prosedur yang cukup sistematis dan terstruktur. Dimulai dari pengajuan klaim, verifikasi data dan dokumen, perhitungan manfaat, otorisasi pencairan, hingga transfer dana kepada peserta. Keseluruhan proses tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan regulasi yang berlaku.
- c. Meskipun sistem telah terintegrasi, masih terdapat beberapa kendala di lapangan, seperti ketidaksesuaian data peserta dengan sistem, keterlambatan pengumpulan dokumen oleh peserta, serta belum adanya fitur pelacakan status klaim secara mandiri oleh peserta melalui aplikasi.

5.2 Saran

Sebagai bentuk pengembangan lebih lanjut, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, antara lain:

- a. Secara umum sistem informasi akuntansi pembayaran klaim yang diterapkan oleh DPLK BNI sudah cukup baik, namun untuk meningkatkan daya saing dan pelayanan kepada peserta, sistem perlu dikembangkan lebih

lanjut, khususnya dengan menambahkan fitur *tracking* status klaim secara *digital* melalui aplikasi atau *portal* DPLK.

- b. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara rutin kepada peserta dan calon peserta mengenai prosedur pencairan manfaat pensiun, dokumen yang dibutuhkan, serta ketentuan pajak yang berlaku. Sosialisasi ini dapat dilakukan secara terencana ke berbagai institusi seperti perusahaan swasta, BUMN, rumah sakit, sekolah, dan lembaga lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam program DPLK.